

BAB V

Kesimpulan

Pasca perang dingin negara – negara di dunia mulai mencari alternatif untuk mendapatkan national interestnya, dimana sebelumnya perang dan kolonialisasi menjadi senjata utama untuk mendapatkan apa yang negara inginkan, dimana pertaruhan untuk perang pun sangat besar, selain sarana dan prasarana akan hancur, korban jiwa pun akan selalu bertambah jika perang terus dipraktikkan. Mulai munculnya globalisasi, hilangnya batas – batas antar negara, berukragnya otoritas negara atas warga negaranya membuat negara berfikir ulang bahwa kepentingan atau national interest tidak harus di capai dengan menggunakan kekerasan, tetapi juga dapat dilakukan dengan cara damai yaitu dengan kerjasama. Dengan adanya kerjasama tentu kerugian – kerugian perang dapat di tekan sehingga korban pun dapat di kurangi jumlahnya.

Kerjasama antar negara dewasa ini menjadi sangat beragam, dari mulai kerjasama keamanan, kerjasama ekonomi hingga kerjasama kebudayaan. Kerjasama ini selain dilakukan untuk mendapatkan national interestnya juga untuk menciptakan citra yang baik di mata dunia. Salah satu yang saat ini banyak dilakukan adalah kerjasama ekonomi, mulai dari perdagangan, investasi, hingga kerjasama pemasaran produk – produk tertentu. Dan salah satu yang saat ini dilakukan Indonesia dengan jepang adalah kerjasama investasi dalam bidang energy, kerjasama ini sangat dibutuhkan Indonesia sebagai negara berkembang

yang butuh asupan energy terutama listrik agar pembangunan dapat merata, serta untuk menanggulangi defisit listrik di masa yang akan datang.

Pada tahun 2011 Indonesia dan Jepang telah melakukan perjanjian investasi dengan skema BOOT (Build, own, operate, transfer) dalam investasi pembangunan pembangkit listrik tenaga uap yang berlokasi di kabupaten Batang Jawa Tengah. Proyek ini terus di bahas oleh kedua negara, proyek besar ini direncanakan mampu untuk membuat daya sebesar 2 x 1000 megawatts di tanah seluas 125.146 meter persegi. Proyek ini didanai oleh JBIC (Japan Bank for International Cooperation) sekitar 50 triliun, sementara sisanya didanai oleh MNC Jepang J-power dan Itochu sebesar 5,8 triliun, dimana J-Power serta Itochu bersinergi dengan Adro Indonesia untuk membentuk PT.Bhimasena Power Indonesia pelaksana investasi dan nantinya juga sebagai operator PLTU. Dalam investasi pembangunan PLTU ini peran pemerintah Jepang melalui JBIC serta MNC nya tentu sangatlah besar Karena mereka sebagai penyedia dana pembangunan. Tetapi sebagai investor, pihak Jepang juga bergantung dengan peran pemerintah Indonesia sebagai penyedia sarana investasi.

Proses investasi tersebut pada kenyataannya tidak berjalan dengan mulus. Muncul hambatan – hambatan dari dalam maupun luar negeri. Dari dalam negeri pemerintah Indonesia menghadapi masyarakat nya sendiri yang menentang pembangunan PLTU tersebut, hal ini di tambah dengan dukungan Greenpeace dan Walhi yang selalu membantu masyarakat untuk menentang proyek tersebut. Masyarakat serta pihak yang kontra berpendapat bahwa proyek ini hanya akan menguntungkan pihak swasta saja. Belum lagi masyarakat sekitar akan menjadi

korban Karena akibat dari karbon itu akan merusak alam sekitar sebagai tempat mata pencarian mereka. Selain itu masyarakat juga resah karena dengan adanya pembangunan PLTU tersebut hasil laut juga akan mati karena limbah yang akan di hasilkan saat PLTU beroperasi. Proyek ini juga dituding sebagai wujud ketidak konsistenan presiden Sulilo Bambang Yudhoyono dalam komitmennya mengurangi emisi gas kotor.

Sementara hambatan eksternal justru datang dari pemerintah Jepang. berumula dari laporan dari Greenpeace dan beberapa organisasi, memberi masukan kepada Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe dan parlemen untuk mengkaji ulang proyek pembangunan PLTU terbesar di Asia Tenggara ini. Komisi HAM Indonesia menyatakan bahwa dengan adanya proyek ini telah terjadi pelanggaran HAM di mana – mana. Tentunya dengan adanya laporan Greenpeace ini membuat pihak investor menjadi ragu untuk meneruskan proyek ini. Hal ini didukung oleh Usulan dari Mizuho salah satu anggota parlemen Jepang, Mizuho beranggapan PLTU yang pengoperasiannya memakai batu bara akan menyisakan limbah yang sangat buruk pengaruhnya bagi lingkungan sekitar Batang. Karena itu, dia mendesak pemerintah Jepang dan juga beberapa lembaga pemodal lain untuk menghentikan proyek itu.

Dengan adanya hambatan ini tentu pemerintah Indonesia memberikan solusi – solusi agar proyek ini dapat berjalan dengan baik. Untuk mengatasi hambatan – hambatan dalam negeri pemerintah Indonesia berfokus kepada masyarakat yang menentang proyek ini, pemerintah serta PT BPI memberikan sosialisasi agar masyarakat paham bahwa proyek ini merupakan proyek nasional yang tidak akan membahayakan masyarakat jika mereka bisa mengikuti prosedur

dengan benar, pemerintah juga di sadarkan akan teknologi canggih yang digunakan. Selain itu pemerintah juga memberikan kompensasi dana dan sosial berupa uang ganti tanah serta ganti pertanian yang diberikan agar masyarakat tetap bisa bekerja untuk menghidupi keluarganya. Dilakukan pula program penciptaan wirausahawan baru yang didukung program membaca dengan menyediakan perpustakaan di desa yang terkena dampak pembangunan PLTU, dengan ini diharapkan masyarakat melunak, dan rela tanahnya di pakai, sehingga greenpeace dan walhi pun tidak punya pondasi kuat untuk terus menentang proyek ini.

Sementara untuk hambatan luar negeri yang di akibatkan oleh keraguan jepang, dilakukan lah diplomasi secara damai yang ditandai dengan pertemuan kedua negara. Hal ini dilaukan di era SBY serta era jokowi, mereka menceritakan bagaimana perntingnya proyek ini bagi masyarakat dan negaranya. Hingga pada akhirnya pemerintah jepang melakukan financial close pada pertengahan tahun 2016 dimana ini berarti investasi yang dilakukan jepang berhasil masuk ke Indonesia.